KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			=					
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR :	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 5 0 8				Final	
		H.2 X Pembetula	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
A DENITITAD DENIEDIMA DENIGUACIA AN VANO DIDOTONO								
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 6 7 9 8 4 7 3 5 0 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : DYAN PUSPITA WULANDARI								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		ASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	3.50	0.000	3.500.000	0	5	175.000	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04392/LS-THR/RSJD.AHM/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 уууу								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggal dd mmyyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.3 ID Subunit Organisasi :								
-		2 6 dd 0 4	m_m 2	0 2 2 уууу			_	
C.5 Nama Penandatangan : RIANDY								
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						benar dan telah saya		
		Sesuai dengan ketentua elektronik sehingga tida		rlaku, Direktorat Jenderal Pajak n tanda tangan.	mengatur bahwa di	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

E1FSL0R3